



## RENSTRA PERUBAHAN 2019-2024

**DINAS SOSIAL KABUPATEN  
CIAMIS**

Jalan Tentara Pelajar No. 13 Telp. (0265) 771096

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024 telah dapat kami selesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun mendatang yang memuat program dan kegiatan untuk mendukung program Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan Dinas Sosial yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Kementerian dan lembaga serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang sosial sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

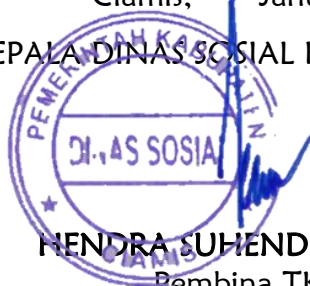
Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan Dinas sosial Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai visi dan misi kepala daerah terpilih.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan seluruh perhatian dan tenaganya dalam mewujudkan dokumen Perubahan Renstra Dinas Sosial periode 2019-2024.

Semoga, apa yang akan kita laksanakan mendapat ridlo dari Allah SWT serta bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Tatar Galuh Ciamis khususnya dan Bangsa Indonesia pada umumnya.

Ciamis, Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS



**HENDRA SUHENDRA, S.SOS, M.Si.**

Pembina TK I, IV/b

NIP. 19690429 199403 1 003

## DAFTAR ISI

	<i>hal</i>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	lii
<b>BAB. I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS</b>	<b>8</b>
2.1. Tugas, Fungsi DAN Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis .....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Ciamis .....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis .....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis .....	30
<b>BAB. III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS</b>	<b>32</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis .....	32
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	33
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/lembaga dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat .....	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	35
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36
<b>BAB. IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>38</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial .....	38
<b>BAB. V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>43</b>
<b>BAB. VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>63</b>
<b>BAB. VIII. PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial Per desember 2021	21
Tabel 2	Saldo Kas Per desember 2018 beserta daftar nilai aset	22
Tabel 3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2018	27
Tabel 4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	35
Table 5	Perkembangan Capaian Indikator SPM Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2020	27
Table 6	Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis	32
Table 7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	38
Table 8	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	40
Table 9	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	40
Table 10	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 2019-2024	44
Table 11	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan pemerintahan Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program urusan wajib yaitu urusan sosial yang di kelola oleh Dinas Sosial. Urusan Sosial di Dinas Sosial pada intinya untuk mendukung program pemerintah dalam menangani kemiskinan di wilayah Kabupaten Ciamis dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan adanya perubahan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2019-2024, maka Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ciamis disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis didalam Penyusunan Rencana Strategis untuk periode 2019-2024 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra baik dengan Renstra Provinsi maupun Kementerian Sosial RI, Penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi.
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra PD; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra PD.

## 1.2 DASAR HUKUM

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : Undang – Undang Dasar 1945
- c. Landasan Operasional :
  - 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950);
  - 2. Undang – Undang Nomor 5 PRPS Tahun 1964 Tentang Pemberian Penghargaan dan Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
  - 3. Undang – Undang Nomor 33 PRPS Tahun 1964 Tentang Penetapan Penghargaan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
  - 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Kepada Orang Jompo;
  - 5. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 32, tambahan lembaran negara nomor 3134);
  - 6. Undang – Undang Nomor 89 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
  - 7. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang no.13 tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia;
  - 8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  - 9. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara nomor 3796), sebagaimana telah diperbaharui dengan undang - undang republik indonesia no.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat;
  - 10. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

11. Undang – Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 1990, tambahan lembaran Negara Nomor 3796);
12. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
13. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (lembaran negara tahun 2000 nomor 206, tambahan lembaran negara nomor 4033);
14. Undang – Undang Nomor 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389);
16. Undang – Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438);
17. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
18. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
19. Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
20. Undang – Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin;
21. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
22. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
23. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Percepatan penanggulangan kemiskinan;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
31. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
32. Keputusan Presiden RI Nomor 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
33. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Noomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 83 HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012

tentang jenis, Definisi dan Kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan social (PSKS),

37. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
38. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 40/HUK/X/1980 Tentang Organisasi Sosial;
39. Perda Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2000 seri D);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2014 – 2019;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
42. Perda Nomor 5 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Sratejik pemerintah Kabupate Ciamis Tahun 2014 – 2019;
44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 97 Tahun 2021 tentang uraian fungsi Kelompok Substansi pada organisasi jabatan administrasi di lingkungan Dinas Sosial
45. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial.
46. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2019 tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.3.1 Maksud**

Maksud dari Renstra Dinas Sosial adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan Bidang urusan Sosial untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan untuk memberikan

gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari Renstra Dinas Sosial adalah :

- menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di bidang urusan Sosial.
- Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan sosial.
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Sosial.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis disusun sebagai berikut :

### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS.**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Ciamis
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

- 3.3 Telaahan Renstra K/L Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

#### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII. PENUTUP**

**Lampiran :**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL**  
**KABUPATEN CIAMIS**

**2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

**2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**A. KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **B. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program kerja Dinas;
  - b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
  - c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan;
  - e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja;
  - f. penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik daerah;
  - h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - i. penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - j. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - l. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
  - m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Perencanaan**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas persiapan dan koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja dinas ;
  - b. Persiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
  - c. Persiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
  - d. Pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, Program, kegiatan dan anggaran ;
  - f. Pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar lembaga;
  - g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Sekretaris.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. Penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. Pengelolaan perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset/barang milik daerah lainnya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat;
  - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat;
  - c. Penyelenggaraan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial, pemberdayaan keluarga miskin, kepahlawanan, keperintisan dan komunitas adat; dan
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial**

- (1) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

- (2) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi meliputi pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, wahana kesejahteraan berbasis masyarakat, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan family care unit.
- (3) Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Sumbangan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan sumbangan sosial;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan;
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat**

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.
- (2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Pemberdayaan keluarga miskin, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Komunitas Adat.

- (3) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin, Kepahlawanan, Keperintisan dan Komunitas Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, keahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, keahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
  - c. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan keluarga miskin, keahlawanan, keperintisan, dan komunitas adat;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL**

- (1) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan.
- (3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas**

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas.
- (3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan**

- (1) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan.
- (3) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban NAPZA dan Korban Tindak Kekerasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
  - b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi tuna sosial, korban NAPZA dan korban tindak kekerasan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **E. BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

- (1) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bantuan dan perlindungan sosial.
- (3) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bantuan dan Perlindungan Sosial;
  - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
  - c. penyelenggaraan fasilitasi Bantuan dan Perlindungan Sosial;
  - d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan;
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **❖ Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana**

- (1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana.
- (3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana ;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
- c. pelaksanaan fasilitasi perlindungan sosial korban bencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- e. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial.
- (2) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan jaminan sosial.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
  - b. Pelaksanaan penyusunan bahan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
  - c. Pelaksanaan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
  - d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - e. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

❖ **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati sendiri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

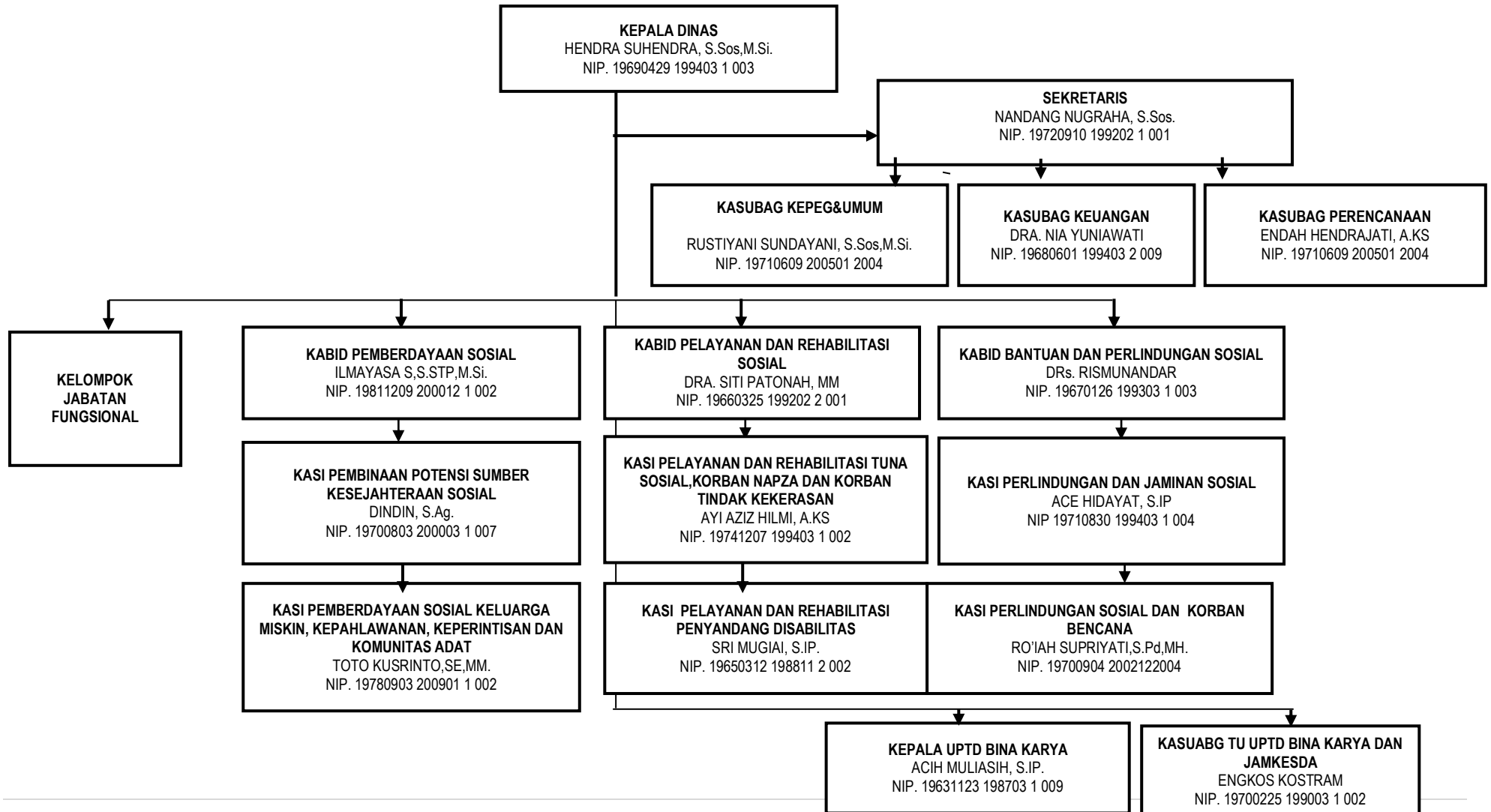
❖ **Kelompok Jabatan Fungsional**

1. Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai fungsi pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan pe undang-undangan.
3. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan satuan organisasi perangkat daerah.

**2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021**



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) KEPEGAWAIAN

Dibidang Sumber Daya Manusia , jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021 sebagaimana tersaji pada table dibawah ini :

Tabel 2.2

Daftar Pegawai Dinas Sosial  
Berdasarkan Jenis kelamin Tahun 2021

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	3	3	6
3	Bidang Pemberdayaan	3	-	3
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	2	3
5	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	2	2	4
6	UPTD Bina Karya & Jamkesda	1	1	2
7	Jabatan Fungsional	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	11	8	19

Tabel 2.3

Daftar Pegawai Dinas Sosial  
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

NO	URAIAN	GOLONGAN								JUMLAH
		IV				III				
		a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas		1							1
2	Sekretariat	1	1			1		1	2	6
3	Bidang Pemberdayaan	1						1	1	3
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1							2	3
5	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	1					1		2	4
6	UPTD Bina Karya & Jamkesda							1	1	2
7	Jabatan Fungsional									
	<b>Jumlah</b>	4	2			1	1	3	8	19

Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Sosial memiliki pegawai yang golongan IV sebanyak 6 orang dan Golongan III sebanyak 13 orang.

Tabel 2.4

**Daftar Pegawai Dinas Sosial  
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**

NO	URAIAN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		S2	S1	DIV	DIII	SLTA	
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretariat	1	3	1	1		6
3	Bidang Pemberdayaan	1	2				3
4	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	1	1	1			3
5	Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial	1	2			1	4
6	UPTD Bina Karya & Jamkesda		1			1	2
7	Jabatan Fungsional						
	<b>Jumlah</b>	5	9	2	1	2	19

Tabel 2.4 menjelaskan bahwa pegawai dinas Sosial berpendidikan tertinggi S2 dan terendah SMA/SLTA.

### 2.2.1 Aset

Aset gedung yang dimiliki Dinas Sosial ada 3, yaitu Gedung Dinas Sosial, Gedung UPTD dan Gedung LTPKD sedangkan untuk kendaraan memiliki 7 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit kendaraan Roda 2.

Penertiban administrasi barang inventaris daerah yang dikelola di Dinas Sosial sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.5

**DAFTAR REKAPITULASI ASET  
TAHUN 2021**

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Dinas Sosial	6375 m2			
2	Gedung UPTD	1379 m2			
3	Gedung LTPKD	741 m2			
4	Kendaraan Roda 4 (Empat)	7 unit	6 Unit	0 Unit	1 Unit
5	Kendaraan Roda 2 (Dua)	12 unit	12 Unit	0 Unit	0 Unit
6	Komputer PC	21 Unit	21 Unit	0 Unit	0 Unit
7	Laptop / Note Book	13 unit	10 unit	0 Unit	3 Unit
8	Printer	26 Unit	20 Unit	0 Unit	6 Unit

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak
1	2	3	4	5	6
9	Scaner	3 unit	unit	0 Unit	0 Unit
10	Scaner Canon	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
11	External/ Portable Hardisk	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
12	Camera	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit
13	Handy Cam	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
14	UPS	3 unit	3 unit	0 Unit	0 Unit
15	Server	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit
16	Proyektoor	2 unit	2 unit	0 Unit	0 Unit
17	Handy talky	5 unit	5 unit	0 Unit	0 Unit
18	Facsimile	2 unit	1 unit	0 Unit	1 Unit
19	Unit Tranceiver	1 unit	1 unit	0 Unit	0 Unit
20	Mast Tower	1 unit	1 unit	0 Unit	0 Unit
21	Compresor Gigi	1 unit	1 unit	0 Unit	0 Unit
22	Lemari Es	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit
23	A C Split	6 unit	6 unit	0 Unit	0 Unit
24	Kipas Angin	7 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Unit
25	Kompom Gas	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
26	Televisi	7 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Unit
27	Amplifier	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
28	Loudspeaker	1 unit	1 unit	0 Unit	0 Unit
29	Sound System	2 unit	2 unit	0 Unit	0 Unit
30	Dispenser	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit
31	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	3 unit	3 unit	0 Unit	0 Unit
32	Meja Kerja	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit
33	Kursi Kerja	15 unit	15 unit	0 Unit	0 Unit
34	Meja Biro	13 unit	13 unit	0 Unit	0 Unit
35	Meja Kerja Kayu	13 Unit	13 Unit	0 Unit	0 Unit
36	Kursi Rapat	6 Unit	6 Unit	0 Unit	0 Unit
37	Kursi Lipat	27 Unit	27 Unit	0 Unit	0 Unit
38	Kursi Putar	11 Unit	11 Unit	0 Unit	0 Unit
39	Kursi Tamu	5 Unit	5 Unit	0 Unit	0 Unit
40	Kursi Rapat	128 Unit	128 Unit	0 Unit	0 Unit
41	Kasur/Spring Bed	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit
42	Sofa	4 Unit	4 Unit	0 Unit	0 Unit
43	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit
44	Lemari Buku Arsip	13 Unit	13 Unit	0 Unit	0 Unit
45	Tenda	7 Unit	7 Unit	0 Unit	0 Unit
46	Papan Nama Instansi	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
47	Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
48	Papan Visual/Papan Nama	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak
1	2	3	4	5	6
49	CCTV - Camera Control Television System	1 Unit	0 unit	1 Unit	0 Unit
50	Lemari Kaca	2 Unit	2 Unit	0 Unit	1 Unit
51	Brandkas	1 Unit	1 1Unit	0 Unit	0 Unit
52	Filing Cabinet Besi	4 Unit	2 Unit	0 Unit	2 Unit
53	Rak Besi	9 Unit	9 Unit	0 Unit	0 Unit
54	Lemari Kayu	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit
55	Lemari Besi/Metal	4 Unit	3 Unit	0 Unit	1 Unit
56	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
57	Air Conditioning Unit	3 Unit	3 Unit	0 Unit	0 Unit
58	Global Positioning System	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
59	Mesin Pompa air PMK	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
60	Gergaji	2 Unit	2 Unit	0 Unit	0 Unit
61	Perkakas Bengkel Service Lain-Lain	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit
62	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	4 unit	4 unit	0 Unit	0 Unit
63	Alat Penghancur Kertas	1 Unit	0 Unit	0 Unit	1 Unit

### 2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya.

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik secara fisik maupun sosial psikologis yang disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini berubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 ada 26 Permasalahan Sosial atau PMKS/PPKS, yaitu :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak Dengan Kecacatan (ADK)
6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Cacat
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas (Waria)
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS
17. Pengguna NAPZA
18. Korban Traffiking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psychologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Sedangkan yang termasuk kedalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi :

1. Pekerja Sosial Profesional
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
3. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

5. Karang Taruna
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
7. Keluarga Pioner
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
9. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial
10. Penyuluh Sosial
11. Pekerja Sosial Kecamatan
12. Dunia Usaha

Tabel 2.6

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial  
Kabupaten Ciamis Tahun 2016 - 2020**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang tertangani				16981	32062	138.161	143.783	178.777	36083	34288	139.602	144.960	232.081	212,49	106,94	101,04	78,62	123,4
2	Persentase (%) Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang tertangani				100	100	100	100	100	212,49	106,94	101,04	100,82	129,82	212,49	106,94	100,82	100,82	129,82
3	Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial				100	100	100	100	100	188,50	91,67	99,97	100,84	131,67	188,50	91,67	99,97	100,84	131,67
4	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				40	100	100	100	100	100	75,86	91	31,40	32,37	189,65	75,86	91	31,40	32,37
5	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				100	100	100	100	100	100	75,86	75	72	100	100	75,86	75	72	100
6	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	119	100	100	100	100	119
7	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)				100	100	100	100	100	91	100	100	14	100	91	100	100	14	100
8	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial				100	100	100	100	100	100	100	97	100	100	100	100	97	100	100
10	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi																		

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa indikator Penayandang Disabilitas pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan penanganan di bawah 100% cukup drastis , hal ini pada masa pandemi covid - 19 dan bantuan sebagian besar melalui kemensos.

Selanjutnya untuk masalah anggaran dan realisasi pendanaan pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada 5 (Lima) tahun terakhir sebagaimana tersajikan pada tabel berikut :

**Tabel. 2.7. ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIAMIS**

1 - 3

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun-					Persentase Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung	3.646.228.413	2.710.000.000	2.144.088.000	2.082.487.000	1.993.904.250	3.625.257.771	2.687.438.688	2.140.081.079	2.073.168.233	1.987.223.513	99	99	100	100	100	-13,42	-13,38
Belanja Tidak Langsung	3.366.793.750	2.687.438.688	3.142.527.800	2.913.407.217	2.771.061.754	3.350.279.503	2.267.445.093	3.107.712.416	2.910.644.300	2.607.831.702	100	84	99	100	94	4	3

Apabila melihat tabel di atas, realisasi anggaran tahun 2019 dan tahun tahun 2020 mengalami penurunan anggaran hal ini karena adanya efisiensi dan pandemi covid-19. Besarnya Anggaran di Dinas Sosial terutama untuk Hibah dan Bansos, untuk Bansos tiap Tahun mencapai Rp. 3 Milyar yaitu RUTILAHU.

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

Tantangan dan peluang Dinas Sosial Kabupaten Ciamis meliputi :

### **1. Identifikasi Faktor Internal**

Dalam menganalisis lingkungan internal, hal yang menjadi perhatian utama adalah berupa faktor kekuatan dan kelemahan yang antara lain :

#### **a. Kekuatan**

- 1) Adanya lembaga/dinas
- 2) Tersedianya jumlah pegawai
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana
- 4) Adanya program kerja
- 5) Dedikasi pegawai

#### **b. Kekurangan**

- 1) Belum optimalnya Profesionalisme SDM
- 2) Sarana dan prasarana pendukung belum memadai
- 3) Belum optimalnya Koordinasi antar berbagai elemen intern
- 4) Pelayanan kepada masyarakat belum optimal

### **2. Identifikasi Faktor Eksternal**

#### **a. Peluang (opportunities)**

- 1) Adanya berbagai peraturan
- 2) Adanya lembaga-lembaga kemasyarakatan
- 3) Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

#### **b. Ancaman (theats)**

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat
- 2) Pemahaman masyarakat yang masih kurang
- 3) jumlah PMKS cenderung mengalami peningkatan

### **3. Kondisi yang diharapkan**

- a. Sarana dan prasarana yang memadai
- b. Aparatur yang profesional
- c. Ruang Kerja yang refresentatif
- d. Anggaran mencukupi
- e. Penambahan pegawai sesuai yang dibutuhkan
- f. Penyelenggaraan pemerintahan lebih optimal

4. Jenis Pelayanan :
- a. Program Keluarga Harapan (PKH);
  - b. Bantuan Beras Bagi Masyarakat Miskin/Raskin/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  - c. Rekomendasi SKTM BPJS;
  - d. Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan Perpanjangan izin Operasioanl Organisasi Sosial (Yayasan/Panti/PSAA).;
  - e. Taruna Siaga Bencana;
  - f. Fasilitasi Proposal Bantuan Sosial dan Bantuan Hibah ;
  - g. Rekomendasi Pengangkatan Anak;
  - h. Rekomendasi Pengasuhan Anak;
  - i. Rekomendasi Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi ABH;
  - j. Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan;
  - k. Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana.
  - l. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (Gangguan Psikotik) ke RSJ dan Panti Sosial Bina Laras;
  - m. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja sosial bagi Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werda (BPSTW);
  - n. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja sosial bagi Tuna Susila ke Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW);
  - o. Rekomendasi dan Fasilitasi Korban Napza ke IPW (Institusi Penerima Wajib Lapo);
  - p. Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke Balai Rehabilitasi;
  - q. Rekomendasi dan Pendampingan Pekerja sosial bagi Penyandang Disabilitas ke Balai rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (BRSPC);
  - r. Bansos RS-RTLH (Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni);
  - s. Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE-FM)
  - t. Bantuan Sosial Penyaluran Bantuan Non Tunai;
  - u. Bantuan Sosial Bantuan Sosial Penyaluran PKH.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

**3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi ke depan Dinas Sosial masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pada Dinasi Sosial

NO.	MASALAH	MASALAH POKOK	AKAR MASALAH
1.	Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial	o DTKS belum reliable dan valid	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ SOP belum dipahami oleh petugas pendata.</li> <li>✚ kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM.</li> <li>✚ Kurangnya kualitas Sarana dan Prasarana penunjang/IT. Penerapan teknologi belum dimanfaatkan secara optimal.</li> </ul>
		o Belum Optimalnya Penanganan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Belum Valid dan Reliabelnya DTKS.</li> <li>✚ Masih adanya ego sektoral dalam penanganan kemiskinan.</li> <li>✚ Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.</li> <li>✚ Peran Aktif PSKS belum maksimal.</li> </ul>
		o Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚.Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.</li> <li>✚ Belum adanya kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.</li> <li>✚ Kurangnya Pemahaman dan kemampuan /keahlian masyarakat dalam pemberdayaan.</li> </ul>

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Sebagai gambaran ke depan di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019 - 2024 mempunyai visi dan misi yang harus dilaksanakan sebagai salah satu komitmen yang disepakati demi mewujudkan Ciamis sebagai kabupaten yang maju, mandiri dan sejahtera. Sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka Visi Kabupaten Ciamis periode Tahun 2019 - 2024 adalah :

**“MANTAPNYA KEMANDIRIAN EKONOMI, SEJAHTERA UNTUK SEMUA “**

Pernyataan visi kabupaten ciamis 2019-2024 memiliki makna sebagai berikut Program Kepala daerah untuk mencapai kemandirian ekonomi, sejahteraan untuk semua di Bidang Sosial terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial ;
2. Program Rehabilitasi Sosial ;
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Program Penanganan Bencana;
5. Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan;

Point 1,2 dan 3 diampuh melalui misi 3, Membangun Perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan sedangkan point 4 diampuh melalui misi 4, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta untuk point 5, diampuh melalui misi 2, Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal.

### **3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA DINAS SOSIAL PROPINSI JAWA BARAT**

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Ciamis tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti legislatif, Instansi Vertikal yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis, masyarakat, dunia usaha didalamnya yang sama-sama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan program dan

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Sasaran Strategis Renstra Kementerian Sosial RI periode 2020-2024 adalah '*Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*' serta '*Sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional*' dengan indikator ; keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan visi "*Terwujudnya Jabar Juara Lahir Batin, dengan inovasi dan kolaborasi*" yang selanjutnya diterjemahkan kedalam visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dengan "*Akselerasi Visi Gubernur Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Penanganan PPKS dan Pemberdayaan PSKS Tahun 2023*", Maka apabila diilustrasikan dan dikaitkan dengan kajian teknokratik Bidang Kesejahteraan Sosial adalah :

1. Juara : Terjadinya penurunan prosentase jumlah PPKS, Optimalisasi peran mitra pemerintah dibidang sosial PSKS, Pelayanan prima dalam pelayanan kesejahteraan sosial, pemenuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Lahir Batin : Terpenuhinya kesejahteraan PPKS sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, Kenyamanan PPKS dalam penanganan PPKS (Perlindungan dan Jasmani PSKS dalam melaksanakan penanganan PPKS);
3. Inovasi : Pemanfaatan teknologi dalam pendataan, penanganan PMKS dan pemberdayaan PSKS, penanganan PPKS yang holistik dan integratif;
4. Kolaborasi : Singkronisasi, integrasi dan sinergitas penanganan PPKS (Pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha). Optimalisasi penanganan PPKS melalui peran dan fungsi perangkat daerah yang relevan dan terkait.

Mengkaji visi, misi dan sasaran strategis dari tingkat pusat sampai daerah pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk penanganan kemiskinan dan PPKS. Kebijakan program dan kegiatan pokok dan prioritas pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan secara sinergis mulai dari perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sehingga pembangunan yang dilaksanakan berkesinambungan sampai dengan tahun target yang ditetapkan.

Didalam pencapaian program dan kegiatan dibidang sosial khususnya dalam Penanganan Kemiskinan dan PPKS di Kabupaten Ciamis, masih terdapat berbagai factor penghambat ditinjau dari sasaran jangka menengah yang antara lain ;

1. Masih banyaknya jumlah keluarga miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) dan PPKS yang memerlukan penanganan secara lintas sector serta peningkatan koordinasi yang lebih terintegratif ;
2. Kemandirian dan produktivitas keluarga miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masih rendah memerlukan peningkatan pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha agar mereka mampu mandiri;
3. Peran kelembagaan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) didalam penanganan dan pemberdayaan keluarga miskin dan PPKS belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, terdapat beberapa factor yang menjadi pendorong didalam pelayanan Dinas Sosial antara lan :

1. Meningkatkan upaya penanganan keluarga miskin dan PPKS secara lebih holistik dan terintegratif;
2. Meningkatkan dukungan stakeholders dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan penanganan PPKS.
3. Mengoptimalkan ketertiban peran kelembagaan dan PSKS.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Didalam penanganan PMKS/PPKS masih terdapat berbagai faktor penghambat maupun pendorong terkait dengan upaya penanganan

permasalahan berdasarkan Tata Ruang Kewilayahan dan Kajian Lingkungan Hidup yang lebih strategis, antara lain :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kebencanaan berupa Gergaji besar untuk memotong pohon besar yang tumbang, tanki air untuk menampung air bersih ketika penampungan korban bencana, baik berupa bencana alam maupun bencana lainnya.
2. Belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam relokasi dan reboisasi daerah yang terkena bencana maupun daerah rawan bencana.

Sejalan dengan hal dimaksud, guna lebih mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan terdapat beberapa factor pendorong sebagai potensi sumber antara lain :

1. Jumlah Anggota Taruna Siaga Bencana yang cukup memadai (50 orang).
2. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang intensif antara pihak pemerintah baik secara personal maupun dari aspek anggaran dengan para Potensi Sumber kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Provinsi dan Pusat (Kementrian Sosial RI) untuk dukungan bantuan logistik dan kelengkapan peralatan kebencanaan lainnya;

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Perumusan isu strategis Kabupaten Ciamis dilaksanakan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional agar tercipta suatu keserasian dan keterpaduan dalam pembangunan. Analisis isu-isu strategis dilakukan untuk meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Dalam mengidentifikasi isu-isu strategis bukan hanya mempertimbangkan isu strategis daerah lain tapi juga kesesuaian atau sinkronisasi dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Selengkapnya mengenai isu-isu strategis dimaksud dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.2  
Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Ciamis

Isu Strategis Nasional Tahun 2020-2024	Isu Strategis RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024
No. Isu 5 Transformasi Ekonomi	No. Isu 2 Kemiskinan, Pengangguran dan Masalah Sosial	No. Isu 3 Penanggulagn Kemiskinan

Isu Strategis RPJMD Kabupaten Ciamis yang berhubungan langsung dengan Urusan Wajib Sosial Dinas Sosial adalah:

**“ Penanggulangan Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial “**

Kemiskinan selalu menjadi isu global yang tidak pernah hilang dari muka bumi, dan menjadi salah satu perhatian Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pertama pembangunan berkelanjutan adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Salah satu tujuan pembangunan daerah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2016-2019 jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis menunjukkan tren yang cukup baik yaitu mengalami penurunan, namun karena adanya kenaikan barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya pandemi Covid-19, maka jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Ciamis kembali meningkat, dan hal ini terjadi di seluruh daerah.

Hasil telaahan berbagai hal terkait dengan berbagai *Factor* yang memengaruhi terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu-isu strategis yang menjadi prioritas pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah “ *Penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja*”. Selanjutnya secara spesifik diprioritaskan pada :

1. Peningkatan perlindungan, pemberdayaan, pengembangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
2. Peningkatan perlindungan, pemberdayaan serta rehabilitasi penyandang disabilitas;
3. Peningkatan Pelayanan kesejahteraan sosial.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai /dihasilkan atau suatu harapan ideal untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengacu kepada Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan secara berkesinambungan melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 “Mantapnya kemandirian ekonomi sejahteraan untuk semua” mengandung arti perekonomian dibangun atas dasar kekuatan potensi sumberdaya yang kita miliki yang didayagunakan seoptimal mungkin, dan kesejahteraan harus dapat dinikmati oleh semua, baik yang kaya maupun miskin, pekerja maupun pengangguran, petani maupun buruh tani, pengusaha maupun pekerja. Semuanya harus terdistribusi secara adil dan merata.

untuk mencapai keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran dari setiap SKPD tidak terkecuali Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

Secara lebih rinci, tujuan dan sasaran RPJMD tersebut diterjemahkan kembali dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sebagaimana tertuang pada table berikut ini :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

No.	TUJUAN	INDIKAOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5
1	2	4	3		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang mandiri	Meningkatnya kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang tertangani	100	100	100	100	100
		Persentase PPKS yang meningkat	Meningkatnya peran Potensi	Persentase PSKS yang	100	100	100	100	100

		keberfungsi an sosialnya	Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS) dalam penanga-nan PPKS	berperangakt if dalam penangan kesejahteraa n sosial.					
		Persentase PSKS yang berpartisipa si aktif dalam program kesejahtera an Sosial			100	100	100	100	100

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis, sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan.

Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis dengan sasaran prioritas pada penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial dan penciptaan lapangan kerja, memiliki strategi dan arah kebijakan yang sejalan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan arah kebijakan 5 tahun kedepan, kemandirian ekonomi adalah harapan pemerintah paling utama. Dinas Sosial yang mempunyai sasaran garapan keluarga miskin dan PPKS, kemandirian ekonomilah yang diharapkan akan menghilangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Motto pelayanan terhadap PPKS “ *berikan dia kail bukan berikan dia ikan* “ adalah motivasi untuk bisa mandiri. Permasalahan ketidakmampuan mandiri adalah karena mentalitas yang sulit untuk dirubah, oleh karena itu strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.1

#### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua				
<b>Misi 2 : Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1,	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Infrastruktur Secara Merata	Meningkatkan Kualitas Pemanfaat Lahan	Meningkatnya pengelolaan Taman makam Pahlawan	Meningkatnya kondisi makam pahlawan menjadi lebih baik
<b>Misi 3 : Membangun Perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi rakyat dan potensi unggulan lokal.</b>				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1,	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial KAT dan meningkatnya pendampingan KAT
			Meningkatnya pelayanan	Memfasilitasi pemulangan warga

			pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan	negara migran korban tindak kekerasan dari debarkasi ke daerah kabupaten
			Meningkatnya pemeliharaan anak terlantar	Meningkatnya kualitas penanganan Anak telantar
			Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
				Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya pemantauan terhadap anak terlantar
				Meningkatnya validitas pendataan DTKS
				Meningkatnya fasilitas pengelolaan Data Fakir Miskin
				Terfasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan keluarga (RUTILAHU)
2.		Meningkatkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Meningkatnya kompetensi TKSK, Kelembagaan Sosial

**Misi 4 : Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>1</b>	Meningkatnya kapasitas terhadap bencana	Mengurangi resiko bencana dan meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Meningkatnya perlindungan korban bencana alam dan sosial serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan logistik bencana dan kompetensi TAGANA

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**SERTA PENDANAAN**

Dinas Sosial Kabupaten Ciamis didalam pelaksanaan Program dan kegiatannya untuk 5 (lima) Tahun ke depan akan melaksanakan beberapa program dan Kegiatan antara lain :

**Draft Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD  
Dinas Sosial Kabupaten Ciamis**

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan ( Tahun 2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Urusan	Unit Kerja Perangkat daerah Penanggungjawab	Lokasi		
			2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				4.888.307.500		6.316.568.000		6.764.765.750		7.281.922.913		6.611.805.008		31.863.369.170	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi AKIP	B	B	7.200.000	BB	32.158.000	BB	56.640.000	BB	55.621.125	BB	58.402.181	BB	58.402.181	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	nilai 500	650	298.800.000	650	2.595.577.929	650	2.740.148.000	650	3.566.836.025	650	3.920.124.164	650	3.920.124.164	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	nilai 82,67	86,3	560.623.250	86,3	1.108.023.648	90	606.140.000	90	2.330.453.464	90	2.467.836.721	90	2.467.836.721	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		Level Maturitas SPIP	nilai 3	3	866.623.250	3	3.735.759.577	3	3.402.928.000	3	5.952.910.614	3	6.446.363.066	3	6.446.363.066	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang difasilitasi	100%	100%	5.900.000	100%	50.450.000	100%	52.972.500	100%	55.621.125	100%	58.402.181	100%	223.345.806	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	3.500.000	1 dok	30.550.000	1 dok	32.077.500	1 dok	33.681.375	1 dok	35.365.444	5 dok	135.174.319	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	n/a	0	1 dok	3.500.000	1 dok	3.675.000	1 dok	3.858.750	1 dok	4.051.688	4 dok	15.085.438	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	n/a	0	1 dok	3.500.000	1 dok	3.675.000	1 dok	3.858.750	1 dok	4.051.688	4dok	15.085.438	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	0	1 dok	3.500.000	1 dok	3.675.000	1 dok	3.858.750	1 dok	4.051.688	dok	11.585.438	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	n/a	n/a	0	3 dok	3.500.000	3 dok	3.675.000	3 dok	3.858.750	3 dok	4.051.688	13 dok	11.585.438	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	n/a	n/a	0	1 lap	3.500.000	1 lap	3.675.000	1 lap	3.858.750	1 lap	4.051.688	5 lap	11.585.438	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 lap	5 lap	2.400.000	5 lap	2.400.000	5 lap	2.520.000	5 lap	2.646.000	5 lap	2.778.300	20 lap	12.744.300	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah</b>		100%	2.774.661.754	100%	2.938.985.000	100%	3.245.518.000	100%	3.566.836.025	100%	3.920.124.164	100%	16.446.124.943	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 org/bln	20 org/bln	2.771.061.754	20 org/bln	2.891.675.000	20 org/bln	3.180.842.500	22 org/bln	3.498.926.750	23 org/bln	3.848.819.425	65 org/bln	16.191.325.429	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	n/a	n/a	-	n/a	0	1 dok	15.000.000	1 dok	15.750.000	1 dok	16.537.500	3 dok	47.287.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	0	12 dok	36.210.000	12 dok	38.020.500	12 dok	39.921.525	12 dok	41.917.601	48 dok	156.069.626	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	n/a	n/a	0	1 dok	5.000.000	1 dok	5.250.000	1 dok	5.512.500	1 dok	5.788.125	4 dok	21.550.625	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	1.800.000	1 lap	1.800.000	1 lap	1.890.000	1 lap	1.984.500	1 lap	2.083.725	5 lap	9.558.225	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 lap	1 lap	1.800.000	1 lap	1.800.000	1 lap	1.890.000	1 lap	1.984.500	1 lap	2.083.725	1 lap	9.558.225	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.2.7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	n/a	n/a	0	1 dok	2.500.000	1 dok	2.625.000	1 dok	2.756.250	1 dok	2.894.063	1 dok	10.775.313	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	n/a	n/a	0	100%	15.000.000	100%	16.375.000	100%	17.881.250	100%	19.531.563	100%	68.787.813	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	0	1 dok	2.500.000	1 dok	2.625.000	1 dok	2.756.250	1 dok	2.894.063	4 dok	10.775.313	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	0	1 dok	12.500.000	1 dok	13.750.000	1 dok	15.125.000	1 dok	16.637.500	4 dok	58.012.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	0	1 lap	12.500.000	1 lap	13.750.000	1 lap	15.125.000	1 lap	16.637.500	4 lap	58.012.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada	n/a	n/a	0	1 lap	12.500.000	1 lap	13.750.000	1 lap	15.125.000	1 lap	16.637.500	4 lap	58.012.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

	SKPD	SKPD																
1.3.3	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	0	12 lap	12.500.000	12 lap.	13.750.000	12 lap	15.125.000	12 lap	16.637.500	48 lap	58.012.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n/a	n/a	0	12 lap	25.000.000	12 lap	26.250.000	12 lap	27.562.500	12 lap	28.940.625	48 lap	107.753.125	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.3.5	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	n/a	n/a	0	12 dok	15.000.000	12 dok	16.500.000	12 dok	18.150.000	12 dok	19.965.000	12 dok	69.615.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%	188.070.000	100%	362.407.500	100%	381.027.875	100%	400.629.269	100%	420.660.732	100%	1.752.795.376	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.250.000	12 paket	5.512.500	12 paket	5.788.125	48 paket	26.550.625	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	30.000.000	12 paket	30.000.000	12 paket	31.500.000	12 paket	33.075.000	12 paket	34.728.750	48 paket	159.303.750	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.250.000	12 paket	5.512.500	12 paket	5.788.125	48 paket	26.550.625	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	5.000.000	12 paket	5.000.000	12 paket	5.250.000	12 paket	5.512.500	12 paket	5.788.125	48 paket	26.550.625	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	23.000.000	12 paket	16.203.750	12 paket	17.013.938	12 paket	17.864.634	12 paket	18.757.866	60 paket	92.840.188	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dok	12 dok	9.000.000	12 dok	16.203.750	12 dok	17.013.938	12 dok	17.864.634	12 dok	18.757.866	60 dok	78.840.188	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan						paket	0	paket	0	paket		paket	0	Sosial	Dinas Sosial	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						laporan	0	laporan	0	laporan		laporan	0	Sosial	Dinas Sosial	
1.6.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174 lap	300 lap	111.070.000	175 lap	250.000.000	200 lap	262.500.000	250 lap	275.625.000	250 lap	289.406.250	1175 lap	1.188.601.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	n/a	n/a	-	12 dok	25.000.000	12 dokumen	26.250.000	12 dokumen	27.562.500	12 dokumen	28.940.625	48 dokumen	107.753.125	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.6.9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	n/a	-	12 dok	10.000.000	12 dok	11.000.000	12 dok	12.100.000	12 dok	12.705.000	48 dok	45.805.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	50.000.000	100%	1.220.000.000	100%	1.294.000.000	100%	1.373.000.000	100%	1.457.380.000	100%	5.394.380.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	450.000.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	472.500.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	496.125.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	520.931.250	5 unit roda 4, 10 unit roda 2	1.939.556.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	450.000.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	472.500.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	496.125.000	1 unit roda 4, 2 unit roda 2	520.931.250	5 unit roda 4, 10 unit roda 2	1.939.556.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan						2 unit roda 4, 2 unit roda 2		2 unit roda 4, 2 unit roda 2		2 unit roda 4, 2 unit roda 2		6 unit roda 4, 10 unit roda 2		Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan						3 unit roda 4, 2 unit roda 2		3 unit roda 4, 2 unit roda 2		3 unit roda 4, 2 unit roda 2		7 unit roda 4, 10 unit roda 2		Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

1.7.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	12.100.000	1 Paket	13.310.000	4 Paket	46.410.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.7.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 unit	10.000.000	1 unit	10.500.000	1 unit	11.025.000	1 unit	11.576.250	4 unit	43.101.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						1 unit		1 unit		1 unit		4 unit				
1.7.5	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 unit	150.000.000	1 unit	165.000.000	1 unit	181.500.000	1 unit	199.650.000	4 unit	696.150.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.7.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	n/a	-	1 unit	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	121.000.000	1 unit	133.100.000	4 unit	464.100.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.7.7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n/a	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	52.500.000	1 unit	55.125.000	1 unit	57.881.250	5 unit	265.506.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	120.500.000	100%	130.405.450	100%	141.195.995	100%	151.027.795	100%	163.649.949	100%	706.779.189	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 lap	12 lap	10.000.000	12 lap	10.000.000	12 lap.	10.500.000	12 lap.	11.025.000	12 lap.	11.576.250	36 lap.	53.101.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	35.000.000	12 lap	35.000.000	12 lap.	36.750.000	12 lap.	38.587.500	12 lap.	40.516.875	36 lap.	185.854.375	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	38.000.000	12 lap	35.005.450	12 lap.	38.505.995	12 lap.	40.431.295	12 lap.	44.474.424	36 lap.	196.417.164	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12 lap	12 lap	37.500.000	12 lap	50.400.000	12 lap.	55.440.000	12 lap.	60.984.000	12 lap.	67.082.400	36 lap.	271.406.400	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

		Disediakan																
1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan PD	100%	100%	296.260.000	100%	333.840.000	100%	351.724.000	100%	370.796.400	100%	391.146.040	100%	1.743.766.440	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	152.200.000	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	150.000.000	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	157.500.000	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	165.375.000	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	173.643.750	6 unit roda 4, 18 unit roda 2	798.718.750	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	35.000.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	35.000.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	36.750.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	38.587.500	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	40.516.875	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	185.854.375	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				3 unit roda 4, 1 unit roda 2	35.000.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	35.000.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	35.000.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	35.000.000	3 unit roda 4, 1 unit roda 2	140.000.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n/a	n/a	-	2 unit	10.000.000	5 unit	10.500.000	5 unit	11.025.000	5 unit	11.576.250	5 unit	43.101.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n/a	2 unit	8.000.000	5 unit	5.000.000	2 unit	5.250.000	2 unit	5.512.500	2 unit	5.788.125	2 unit	29.550.625	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	n/a	1 unit	2.300.000	1 unit	10.000.000	1 unit	10.500.000	1 unit	11.025.000	1 unit	11.576.250	1 unit	45.401.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud yang	Jumlah Aset Tak Berwujud yang				1 buah	10.000.000	1 unit	10.500.000	1 unit	11.025.000	1 unit	11.576.250	1 unit	43.101.250			

	Berwujud	Dipelihara																
1.9.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	98.760.000	3 unit	58.840.000	3 unit	64.724.000	3 unit	71.196.400	3 unit	78.316.040	12 unit	371.836.440	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	-	1 unit	10.000.000	1 unit	10.500.000	1 unit	11.025.000	1 unit	11.576.250	4 unit	43.101.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
1.9.8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	-	1 unit	10.000.000	1 unit	10.500.000	1 unit	11.025.000	1 unit	11.576.250	4 unit	43.101.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
II	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS yang meningkatkan kapasitasnya</b>	0%	0%	-	100%	85.000.000	100%	93.500.000	100%	102.850.000	100%	113.135.000	100%	394.485.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		<b>Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial</b>	100%	100%	307.486.000	100%	999.396.000	100%	1.109.335.600	100%	1.212.669.160	100%	1.326.006.076	100%	4.954.892.836	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.1	<b>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</b>	<b>Persentase KAT yang diberdayakan</b>	n/a	n/a	-	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	348.075.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.1.1.	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	5 keluarga	45.000.000	5 keluarga	49.500.000	5 keluarga	54.450.000	5 keluarga	59.895.000	5 keluarga	208.845.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.1.2.	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	5 keluarga	30.000.000	5 keluarga	33.000.000	5 keluarga	36.300.000	5 keluarga	39.930.000	5 keluarga	139.230.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

2.2.	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terfasilitasinya Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	n/a	n/a	-	100 %	10.000.000	100%	11.000.000	100%	12.100.000	100%	13.310.000	100 %	46.410.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.2.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	n/a	n/a	n/a	10 doume	10.000.000	10 doumen	11.000.000	10 doumen	12.100.000	10 doumen	13.310.000	10 doumen	46.410.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.3.	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS yang dikembangkan</b>	100 %	100%	307.486.000	100 %	999.396.000	100%	1.109.335.600	100%	1.212.669.160	100%	1.326.006.076	100 %	4.181.915.722	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.3.1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	120 PSM	120.000.000	120 orang	132.000.000	120 orang	138.600.000	120 orang	145.530.000	120 orang	536.130.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.3.2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	28 orang	28 orang	185.060.000	28 orang	185.060.000	28 orang	203.566.000	28 orang	223.922.600	28 orang	246.314.860	28 orang	270.946.346	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.3.3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	n/a	n/a	1 keluarga	10.000.000	1 keluarga	10.000.000	1 keluarga	10.000.000	3 keluarga	30.000.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
2.3.4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	2 lembaga	84.090.000	4 lembaga	638.000.000	4 lembaga	701.800.000	4 lembaga	771.980.000	4 lembaga	849.178.000	18 lembaga	3.045.048.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

	Kewenangan Kabupaten/Kota																	
2.3.5.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 sertifikat	8 sertifikat	38.336.000	8 sertifikat	56.336.000	8 sertifikat	61.969.600	8 sertifikat	68.166.560	8 sertifikat	74.983.216	40 sertifikat	299.791.376	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
III	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	Persentase warga negara migran yang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya	n/a	n/a	-	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	232.050.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
3.1.	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara migran yang terfasilitasi dalam penanganannya pemulangannya	n/a	n/a	-	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	232.050.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
3.1.1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	5 orang	50.000.000	5 orang	55.000.000	5 orang	60.500.000	5 orang	66.550.000	5 orang	73.205.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
IV	<b>REHABILITASI SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi (da)	100%	100%	114.990.000	100%	652.815.000	100%	781.710.750	100%	835.505.788	100%	893.461.527	100%	3.084.877.689	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

4.1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	28.990.000	100%	499.700.000	100%	508.940.000	100%	545.046.500	100%	584.024.275	100%	1.973.095.400	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	30 orang	12.900.000	30 orang	14.190.000	30 orang	15.609.000	30 orang	17.169.900	120 ORG	59.868.900	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	20 orang	75.000.000	20 orang	78.750.000	20 orang	82.687.500	20 orang	86.821.875	90 org	323.259.375	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	18 org	28.990.000	16 orang	36.800.000	20 orang	70.000.000	20 orang	73.500.000	20 orang	77.175.000	76 orang	286.465.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						20 orang	70.000.000	20 orang	73.500.000	20 orang	77.175.000	76 orang	220.675.000			
4.1.4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	65 orang	245.000.000	40 orang	100.000.000	40 orang	110.000.000	40 orang	121.000.000	40 orang	576.000.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

4.1.5	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	25 orang	50.000.000	25 orang	55.000.000	25 orang	60.500.000	25 orang	66.550.000	25 orang	232.050.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	10 org	5.000.000	10 org	5.500.000	10 org	6.050.000	10 org	6.655.000	40 org	23.205.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.7	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	25 orang	30.000.000	25 orang	31.500.000	25 orang	33.075.000	25 orang	34.728.750	25 orang	36.465.188	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.8	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	25 orang	10.000.000	25 orang	10.500.000	25 orang	11.025.000	25 orang	11.576.250	25 orang	12.155.063	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	n/a	n/a	25 orang	15.000.000	25 orang	15.750.000	25 orang	16.537.500	25 orang	17.364.375	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.1.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	n/a	n/a	25 orang	20.000.000	25 orang	21.000.000	25 orang	22.050.000	25 orang	23.152.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

4.1.11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	25 orang	35.000.000	25 orang	38.500.000	25 orang	42.350.000	25 orang	46.585.000	25 orang	162.435.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Pantii Sosial	Persentase PPKS lainnya diluar Pantii yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100%	100%	86.000.000	100%	153.115.000	100%	272.770.750	100%	290.459.288	100%	309.437.252	100%	1.111.782.289	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	20 orang	5.000.000	20 orang	5.500.000	20 orang	6.050.000	20 orang	6.655.000	20 orang	23.205.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	25 orang	25.000.000	25 orang	26.250.000	25 orang	27.562.500	25 orang	28.940.625	25 orang	107.753.125	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	25 orang	10.000.000	25 orang	11.000.000	25 orang	12.100.000	25 orang	13.310.000	25 orang	46.410.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	n/a	-	20 org	25.000.000	50 org	26.250.000	50 org	27.562.500	50 org	28.940.625	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota																

4.2.6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	n/a	-	25 orang	20.000.000	25 orang	21.000.000	25 orang	22.050.000	25 orang	23.152.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	n/a	-	25 orang	26.000.000	25 orang	27.300.000	25 orang	28.665.000	25 orang	30.098.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	n/a	-	25 orang	26.000.000	25 orang	28.600.000	25 orang	31.460.000	25 orang	86.060.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.9	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	n/a	-	25 orang	12.500.000	25 orang	13.125.000	25 orang	13.781.250	25 orang	14.470.313	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	25 orang	15.000.000	25 orang	15.750.000	25 orang	16.537.500	25 orang	17.364.375	25 orang	18.232.594	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

4.2.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	25 orang	15.000.000	25 orang	16.500.000	25 orang	18.150.000	25 orang	19.965.000	25 orang	69.615.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																
4.2.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	150 org	86.000.000	80 orang	63.115.000	100 orang	66.270.750	100 orang	69.584.288	100 orang	73.063.502	100 orang	272.033.539	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
4.2.14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	n/a	n/a	-	2 dok	20.000.000	2 dok	22.000.000	2 dok	24.200.000	2 dok	26.620.000	2 dok	29.282.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
V	<b>PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	86%	100%	3.342.900.000	100%	4.370.195.000	100%	4.580.195.000	100%	4.953.340.000	100%	4.124.295.000	100%	18.028.025.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	78%	100%	25.000.000	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	373.075.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		Persentase validitas data fakir miskin	85%	100%	213.429.000	100%	509.026.500	100%	509.026.500	100%	509.026.500	100%	509.026.500	100%	2.249.535.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang tertangani	100%	100%	25.000.000	100%	75.000.000	100%	82.500.000	100%	90.750.000	100%	99.825.000	100%	373.075.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.1.1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	15 orang	0	15 orang	25.000.000	15 orang	27.500.000	15 orang	30.250.000	15 orang	33.275.000	75 org	116.025.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.1.2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan	n/a	n/a	0	15 orang	25.000.000	15 orang	27.500.000	15 orang	30.250.000	15 orang	33.275.000	60 org	116.025.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

		Kabupaten/Kota																
5.1.3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	15 orang	25.000.000	15 orang	25.000.000	15 orang	27.500.000	15 orang	30.250.000	15 orang	33.275.000	75 org	141.025.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang terkelola	100%	100%	3.556.329.000	100%	4.879.221.500	100%	5.089.221.500	100%	5.462.366.500	100%	4.633.321.500	100%	23.620.460.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.2.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	155.016 org	152.351 org	213.429.000	152.351 org	509.026.500	152.351 org	509.026.500	152.351 org	509.026.500	152.351 org	509.026.500	764.420 org	2.249.535.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.2.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	136.351 KPM	126.795 KPM	321.450.000	126.795 KPM	848.745.000	126.795 kk	848.745.000	126.795 kk	848.745.000	126.795 kk	848.745.000	643.531 keluarga	3.716.430.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.2.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300 KK	300 KK	3.021.450.000	330 KK	3.321.450.000	350 KK	3.521.450.000	350 KK	3.873.595.000	350 KK	3.021.450.000	1680 KK	16.759.395.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
5.2.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	0	100 orang	200.000.000	100 orang	210.000.000	100 orang	231.000.000	100 orang	254.100.000	100 orang	895.100.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

VI	PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	100%	100%	776.400.000	100%	1.076.400.000	100%	1.142.720.000	100%	1.213.606.000	100%	1.289.411.300	100%	5.498.537.300	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana alam yang tertangani	100%	100%	450.000.000	100%	700.000.000	100%	747.500.000	100%	798.625.000	100%	853.681.250	100%	3.549.806.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 org	602 org	250.000.000	1750 KK	350.000.000	1000 org	367.500.000	1000 org	385.875.000	1000 org	405.168.750	1000 org	1.758.543.750	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 org	100.000.000	50 org	100.000.000	50 org	105.000.000	50 org	110.250.000	50 org	115.762.500	250 org	531.012.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	50 KK	100.000.000	50 KK	250.000.000	10 unit	275.000.000	10 unit	302.500.000	10 unit	332.750.000	10 unit	1.260.250.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.1.4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2 orang	10.000.000	2 orang	11.000.000	2 orang	12.100.000	2 orang	33.100.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.1.5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	25 orang	25.000.000	25 orang	27.500.000	25 orang	30.250.000	75 orang	82.750.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

6.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang meningkat kapasitas kesiapsiagaannya	100%	100%	326.400.000	100%	376.400.000	100%	395.220.000	100%	414.981.000	100%	435.730.050	100%	1.948.731.050	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.2.1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	n/a	n/a	n/a	2 Desa	50.000.000	2 kampung	52.500.000	2 kampung	55.125.000	2 kampung	57.881.250	2 kampung	215.506.250	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
6.2.2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 org	50 org	326.400.000	50 org	326.400.000	50 org	342.720.000	67 Org	359.856.000	50 org	377.848.800	12 bulan	1.733.224.800	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
VII	PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik	100%	100%	50.902.500	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	282.952.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
		Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.500.000	100%	66.550.000	100%	282.050.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
7.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.	100%	6 lokasi makam	100.902.500	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	565.002.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
7.1.1	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	n/a	5 dok	50.000.000	5 dok	50.000.000	1 dok	55.000.000	1 dok	60.500.000	1 dok	66.550.000	1 dok	282.050.000	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis

7.1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	6 lokasi makam	6 lokasi makam	50.902.500	6 lokasi makam	50.000.000	6 lokasi makam	55.000.000	6 lokasi makam	60.500.000	6 lokasi makam	66.550.000	6 lokasi makam	282.952.500	Sosial	Dinas Sosial	Kab. Ciamis
7.1.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						1 lap.		1 lap.				1 lap.				

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 7,1

#### Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2019	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang tertangani	144.361	173.143	164.185	155.126	146.248	137.310	137.310
2.	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	101	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	31	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	72	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti(SPM)	78	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	14	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2019	1	2	3	4	5	1
1	2	3	4	5	1	2	3	4
8.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100
10.	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	63	71	75	80	85	90	90
11.	Hasil Evaluasi SAKIP	B	BB	BB	A	A	A	
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,75	83.17	83.67	84.17	84.67	85.17	85.17
13.	Maturitas SPI	3	4	4	4.5	5	5	5
14.	Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	655	700	750	800	850	900	900

## **BAB VIII P E N U T U P**

Rencana Strategi ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan sosial Dinas Sosial untuk periode 5 (Tahun).

Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sosial Dinas Sosial dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Ciamis yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah selaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Ciamis.

Hal strategis yang harus komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Sosial serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Ciamis.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Sosial harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun laporan Kinerja (LKIP) Dinas Sosial. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Sosial di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target Renstra Dinas Sosial ini.

Ciamis, Januari 2021  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIAMIS



**HENDRA SUHENDRA, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690429 199403 1 003